



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERIODE 2025-2029



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini dapat disusun dengan baik.

Dokumen ini bertujuan sebagai pedoman bagi Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mendukung visi daerah "Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI". Perencanaan strategis ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan perizinan serta mendorong investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Semoga dokumen ini menjadi acuan yang bermanfaat dan dapat diimplementasikan dengan baik untuk kemajuan daerah.



Kuala Tungkal, 11 November 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

M. HAVIZ, S.E.
NIP. 19740613 199602 1 001

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1 Maksud Penulisan Dokumen	6
1.3.2 Tujuan Penulisan Dokumen	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.3 Kinerja Perangkat Daerah.....	13
2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	20
3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	20
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	21
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	23
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	23
BAB V PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menghadapi dinamika global dan tantangan dalam layanan publik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan visi transformasional untuk masa depan, yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”**. Visi ini tidak hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga fondasi strategis dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis ini. Dokumen ini disusun untuk memberikan arah langkah yang tepat dalam mengintegrasikan upaya pengembangan investasi dengan peningkatan pelayanan terpadu, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya saing.

Seiring dengan perubahan lingkungan eksternal dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, terdapat beberapa faktor utama yang mendasari penyusunan dokumen strategis ini:

1. Kondisi Eksternal yang Dinamis

- **Globalisasi dan Persaingan Internasional** : Persaingan investasi yang semakin ketat di tingkat global menuntut daerah untuk berinovasi dan menyediakan iklim investasi yang menarik.
- **Revolusi Digital** : Perkembangan teknologi informasi mempercepat integrasi layanan publik dan menciptakan transparansi dalam tata kelola, yang sejajar dengan semangat digitalisasi dalam mewujudkan pelayanan modern yang responsif.

2. Kebutuhan Internal dan Peningkatan Kinerja Pelayanan

- **Evaluasi Kinerja** : Hasil evaluasi terhadap kinerja layanan terpadu menunjukkan perlunya penyempurnaan sistem untuk mengurangi tumpang tindih birokrasi dan mempercepat proses pelayanan.
- **Sinergi Lintas Instansi** : Peningkatan kolaborasi antar instansi guna mengoptimalkan pelayanan dan menjawab tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman.
- **Peningkatan Kapabilitas Aparatur** : Pembinaan dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia untuk menciptakan inovasi dalam sistem pelayanan.

3. Komitmen Menuju Visi **“BERKAH MADANI”**

- **Nilai Keberkahan** : Mengedepankan prinsip pelayanan yang tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga mencerminkan nilai keberkahan dalam setiap kebijakan dan langkah strategis.
- **Transparansi dan Akuntabilitas** : Penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor.
- **Inovasi Berkelanjutan** : Penataan ulang kebijakan dan program kerja yang selalu diselaraskan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat, mendukung terciptanya lingkungan investasi yang kondusif dan pelayanan yang prima.

Dokumen ini disusun berdasarkan kajian mendalam, serta dialog konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan. Melalui peta strategi dan arah kebijakan yang jelas, semua elemen di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan dapat bekerja sinergis untuk merealisasikan visi **“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”**.

Dengan demikian, dokumen strategis ini tidak hanya sebagai pedoman operasional, tetapi juga sebagai manifestasi komitmen daerah untuk bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih berkah, terpercaya, dan bermartabat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renstras Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
21. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
22. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25. Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
26. Permen PAN RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 32. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang pedoman dan tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 5);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5); dan
 40. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penulisan Dokumen

Dokumen ini disusun sebagai pedoman strategis yang merumuskan arah kebijakan dan langkah-langkah operasional guna mendukung visi Kepala Daerah, yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”**. Secara khusus, maksud penyusunan dokumen ini adalah untuk:

- **Menyediakan Kerangka Strategis** : Menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahunan dan kebijakan yang terintegrasi, sehingga seluruh elemen dalam Dinas memiliki acuan yang jelas dalam menerapkan program investasi dan pelayanan publik.

- **Mewujudkan Sinergi dan Inovasi** : Mendorong sinergi antar unit kerja serta kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat, untuk menciptakan inovasi pelayanan yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
- **Memperkuat Dasar Keputusan** : Menyediakan data dan analisis faktual sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, guna memastikan setiap kebijakan yang dilaksanakan terukur, transparan, dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen strategis ini dirancang dengan tujuan-tujuan berikut:

1. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik** :
Mewujudkan sistem pelayanan terpadu yang efisien, transparan, dan akuntabel sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat.
2. **Mengoptimalkan Penanaman Modal dan Investasi** :
Menyusun strategi yang efektif guna mengoptimalkan potensi investasi, baik dari dalam maupun luar daerah, sekaligus memperkuat daya saing Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. **Mengintegrasikan Sinergi Antar Instansi** :
Memperkuat koordinasi dan sinergi internal di lingkungan Dinas sekaligus membangun kemitraan dengan sektor swasta dan stakeholder lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
4. **Mengantisipasi Dinamika Lingkungan Eksternal** :
Menyusun kebijakan yang adaptif dalam menghadapi perubahan global, termasuk perkembangan teknologi, dinamika politik, dan kondisi ekonomi yang berfluktuasi.
5. **Mewujudkan Visi Daerah** :
Menyelaraskan seluruh program dan inisiatif strategis dengan visi **“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”**, sehingga setiap kebijakan menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, progresif, dan inklusif.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang komprehensif dan kontekstual bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan dan mengambil peluang yang ada, demi mendorong kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Perangkat Daerah
- 2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Bab IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diamsud diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

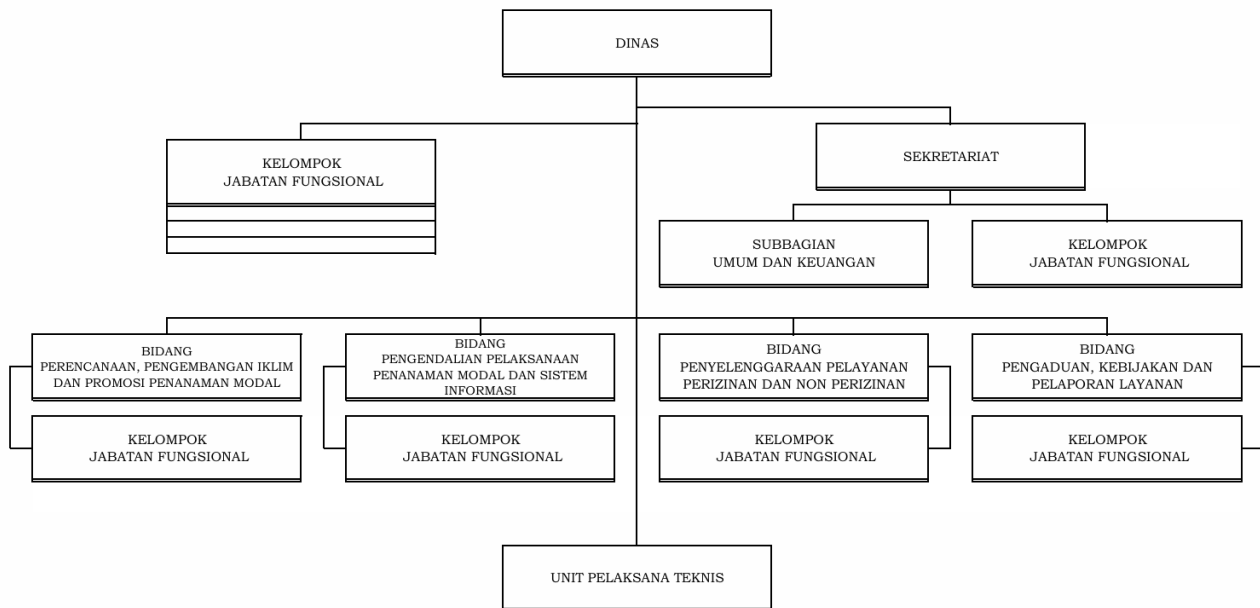
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis.

Bagan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tanjung Jabung Barat



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan, dimana sumber daya tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas.

Sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumber daya manusia berdasarkan jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1 orang
2.	Eselon III	5 orang
3.	Eselon IV	1 orang
4.	Pejabat Fungsional	8 orang
5.	Staf dan PPPK	10 orang
	Jumlah	25 orang

Tabel 2.2

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTP	-
2	SLTA	31 orang
3	D1	-
4	D2	-
5	D3	2 orang
6	S1	33 orang
7	S2	3 orang
	Jumlah	69 orang

Tabel 2.3

Sumber daya manusia berdasarkan status kepegawaian

	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	PNS	25 orang
2.	PPPK	8 Orang
2.	TKK	36 orang
	Jumlah	69 orang

Tabel 2.4

Sumber daya manusia berdasarkan kepangkatan

	Kepangkatan	Jumlah
1.	Pembina Tk I	3 orang
2.	Pembina	2 orang
3.	Penata Tk I	8 orang
4.	Penata	4 orang
5.	Penata Muda Tk I	5 orang
6.	Penata Muda	3 orang
7.	Pengatur Tk I	1 orang
8.	Pengatur	-
9.	Pengatur Muda Tk I	-
10.	Pengatur Muda	-
11.	Juru Tk I	-
12.	Juru	-

	Kepangkatan	Jumlah
13.	Juru Muda Tk I	-
14.	Juru Muda	-
15.	PPPK	8 Orang
16.	TKK	36 Orang
	Jumlah	69 orang

Disamping sumber daya manusia yang profesional, didalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja.

Tabel 2.5
Sarana dan prasarana pada DPM dan PTSP

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung kantor	1 unit	Baik / Terawat
2.	Listrik	1 unit	Baik / Terawat
3.	Air	1 unit	Baik / Terawat
4.	Telpon	1 unit	Baik / Terawat
5.	Area Parkir	1 unit	Baik / Terawat
6.	Ruang Rapat	1 unit	Baik / Terawat
7.	Ruang Arsip	1 unit	Baik / Terawat
8.	Musholla	1 unit	Baik / Terawat
9.	Kendaraan Roda 4	3 Unit	Baik / Terawat
		1 Unit	Rusak Ringan
10.	Kendaraan Roda 2	9 Unit	Baik / Terawat
		4 Unit	Rusak Berat
11.	Meja Rapat	10 Unit	Baik / Terawat
12.	Ac	11 Unit	Baik / Terawat
13.	Komputer PC	6 Unit	Baik / Terawat
14.	Komputer Notebook	11 Unit	Baik / Terawat
15.	Meja Kerja	3 Unit	Baik / Terawat
16.	Filling Kabinet	8 Unit	Baik / Terawat
17.	Rak Arsip	2 Unit	Baik / Terawat
18.	Infokus	1 Unit	Baik / Terawat
19.	Jaringan Internet	1 Unit	Baik / Terawat
20.	Area Taman Luar	1 Unit	Baik / Terawat

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati No 54 Tahun 2018 tentang pendelegasian wewenang penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai kewenangan untuk melayani 125 jenis perizinan sebagai berikut :

Tabel. 2.6
Jenis izin melalui OSS 125 izin, 37 izin serta 13 Non perizinan.

No	Bidang Perizinan	Perizinan Non OSS	Non Perizinan
1	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian
2	Bidang Lingkuagn Hidup dan Kehutanan	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Kesehatan
3	Bidang Sektor Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	Bidang Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Bidang Kelautan dan Perikanan	Bidang Kesehatan	Bidang Kelautan dan Perikanan
5	Bidang Kesehatan	Bidang Perhubungan	Bidang Sektor Perumahan
6	Bidang Perdagangan	Bidang Komunikasi dan Informatika	
7	Bidang Perindustrian	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	
8	Bidang Perhubungan	Bidang Ekonomi	
9	Bidang Pariwisata	Bidang Sosial	
10	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		
11	Ketenagakerjaan		
12	Bidang Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro kecil menengah		
13	Bidang Pertanahan		

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk realisasi Investasi telah melampaui dengan target kinerja dari tahun 2017-2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Investasi

Tahun	Target	Realisasi
2017	17,4 Trilyun	28,8 Trilyun
2018	18 Trilyun	30,5 Trilyun

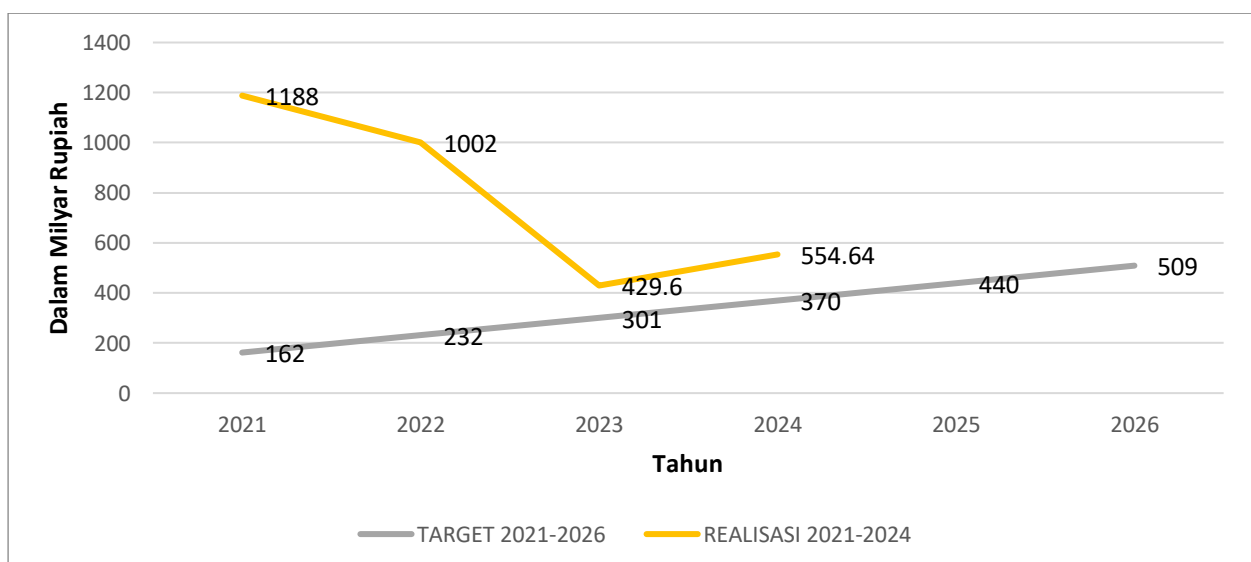
Tahun	Target	Realisasi
2019	18,6 Trilyun	31 Trilyun
2020	19,2 Trilyun	31,5 Trilyun
2021	162 Milyar	1,188 Trilyun
2022	232 Milyar	1,002 Trilyun
2023	301 Milyar	429,6 Milyar
2024	370 Milyar	554,64 Milyar
2025	440 Milyar	491,82 Milyar*
2026	509 Milyar	-

*) Data Triwulan III 2025

Pada RPJMD Periode 2021 – 2026, capaian 2 tahun pertama 2021 dan 2022 sangat luar biasa. Pada tahun 2021 Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 1.151.265,12 USD, dan untuk Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 1.166.381.478.802. Kurs Rupiah pada Tahun 2021 sebesar Rp. 14.600,-. Sehingga total realisasi investasi pada tahun 2021 menjadi 1.188 Trilyun Rupiah. Pada tahun 2022, realisasi investasi mengalami penurunan 16% dari tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.002 Trilyun Rupiah dengan jumlah PMA 5.490.499,21 USD dan PMDN Rp. 922.162.981.877.

Grafik 2.1

Target dan Capaian Realisasi Investasi Periode 2021- 2026



Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah kajian potensi dan peluang usaha Kabupaten	Dokumen	1	1	1	1			1	2	1	-			100%	200%	100%	0%		
2	Jumlah Calon Investor	Calon Investor	1	2	2	2			-	3	3	2			0%	150%	150%	100%		
3	Jumlah total perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Izin	2.000	2.000	2.000	2.000			1.406	2.769	5.445	5.229			70%	138%	272%	261%		
4	Nilai Realisasi Rencana Investasi	Milyar Rp.	162	232	301	370			1.118,50	1.002,32	429,6	554,64			690%	432%	143%	150%		
5	Jumlah sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterapkan	Sistem Informasi	1	1	1	1			1	1	1	1			100%	100%	100%	100%		
6	Jumlah investor (PMDN/ PMA)	Perusahaan	42	42	44	50			46	50	72	84			110%	119%	164%	168%		
7	Nilai Investasi PMA/ PMDN	M	162	232	301	370			1118,50	1002,32	429,6	554,64			690%	432%	143%	150%		
8	Jumlah penyerapan tenaga kerja terhadap investasi	Orang	467	538	608	701			1881	268	526	786			403%	50%	87%	112%		
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	A	A	A	A			A	A	A	A			100%	100%	100%	100%		
10	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	%	3,50%	4,83%	5,99%	6,96%			32,52%	10,03%	7,35%	29,11%			929%	208%	123%	418%		

Tabel 2.9

Realisasi Indikator Kinerja Utama Perangkat DPMTSP Periode 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya Pelayanan Perizinan Berkualitas dan meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
				91,81		90,01		90,195		91,207		93,83*			
		Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Milyar Rp)	162	1118,5	232	1002,32	301	429,6	370	554,64	440	491,82*	509	

*) Data Realisasi TW III Tahun 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai indikator kinerja strategis. Berdasarkan data capaian tahun 2021 hingga 2024, berikut adalah sorotan utama dari pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung investasi, pengembangan usaha, dan peningkatan kualitas SDM :

❖ Pengembangan Potensi dan Investasi

- Kajian potensi dan peluang usaha secara konsisten dilakukan, meskipun sempat tidak tercapai di 2024. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan perencanaan dan monitoring tahunan.
- Jumlah calon investor meningkat signifikan, dari nihil di 2021 menjadi 3 di 2022 dan 2023, menunjukkan efektivitas promosi dan fasilitasi investasi.
- Realisasi nilai investasi (PMA/PMDN) melonjak tajam, mencapai Rp1.118,5 miliar di 2021 dan tetap tinggi di tahun-tahun berikutnya. Rasio capaian jauh melampaui target, menandakan daya tarik investasi yang kuat di daerah.

❖ Perizinan dan Sistem Informasi

- Jumlah izin usaha yang diterbitkan mengalami lonjakan dari 1.406 di 2021 menjadi 5.445 di 2023, mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan efisiensi pelayanan.
- Sistem informasi perizinan berhasil diterapkan secara konsisten setiap tahun, mendukung transparansi dan kemudahan layanan publik.

❖ Dampak Sosial dan Ekonomi

- Penyerapan tenaga kerja dari investasi menunjukkan fluktuasi, dengan capaian tertinggi di 2021 (403%) dan peningkatan kembali di 2024 (112%). Ini menandakan perlunya strategi yang lebih stabil dalam menghubungkan investasi dengan penciptaan lapangan kerja.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) konsisten berada di kategori A, mencerminkan kualitas pelayanan publik yang baik.
- Persentase peningkatan investasi mencapai puncaknya di 2021 (929%) dan kembali melonjak di 2024 (418%), menunjukkan dinamika ekonomi yang responsif terhadap kebijakan daerah.

Dalam melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal bermitra dengan perangkat daerah lain seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk urusan perizinan dan non perizinan dibidang pendidikan, Dinas Kesehatan untuk urusan perizinan dan non perizinan dibidang kesehatan dan tenaga medis, Dinas PerindagKop dan UMKM untuk urusan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan, Koperasi, dan UMKM. Dinas Pemuda dan Pariwisata untuk urusan perizinan dan non perizinan bidang kepemudaan dan pariwisata, Dinas PUPR untuk urusan PBG dan Tata Ruang.

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dampak identifikasi permasalahan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang akan berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2025-2029. Permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub kegiatan OPD. Beberapa permasalahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Posisi strategis sebagai fasilitasi dan promosi investasi daerah	Belum optimalnya sistem informasi dan promosi investasi yang terintegrasi serta minimnya koordinasi lintas sektor	Promosi dan fasilitasi investasi daerah berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan serta selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mendorong investasi hijau, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan ekologis	Perubahan iklim investasi dan digitalisasi tranformasi ekonomi global	Kebijakan industri hilirisasi	Keterbatasan data investasi daerah serta perubahan kebijakan pusat dan daerah	Rendahnya daya saing investasi daerah
Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu	Minimnya pelatihan teknis dan pembinaan kompetensi SDM perizinan dan kendala penerapan sistem OSS yang belum mencakup seluruh izin kewenangan Kabupaten	Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM agar setiap proses perizinan mampu mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi	Transformasi digital global dan tingkat keamanan terhadap perlindungan data	Tuntutan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas	Kualitas SDM dan kapasitas teknis petugas layanan dan kebutuhan dunia usaha yang semakin kompleks	Infrastruktur dan teknologi pendukung layanan belum memadai
Koordinasi lintas sektor untuk pengembangan potensi ekonomi lokal	Belum optimalnya pemahaman lintas sektor tentang fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinasi Investasi dan pembangunan berkelanjutan daerah yang melibatkan OPD, dunia usaha, dan komunitas lokal	Perubahan pola ekonomi dunia	Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan Kolaboratif	Kebutuhan sinkronisasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat	Belum optimalnya kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat

Dalam RPJM Nasional 2025-2029, investasi dan penanaman modal menjadi aspek penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia menargetkan kebutuhan investasi sebesar Rp47,59 kuadriliun selama periode tersebut, dengan mayoritas investasi berasal dari sektor swasta. Pemerintah juga berupaya meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional.

Selain itu, RPJM Nasional 2025-2029 juga menjadi fondasi awal untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yang mencakup transformasi ekonomi dan pembangunan wilayah. Dokumen ini mengatur strategi pembangunan nasional, termasuk kebijakan investasi yang mendukung pertumbuhan industri dan ekspor.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Periode tahun 2021 sampai dengan Triwulan III tahun 2025 menunjukkan dua hasil utama : Indeks Kepuasan Masyarakat layanan perizinan berada pada level sangat memuaskan dengan skor antara 90–94, menandakan perbaikan prosedur dan digitalisasi layanan; sedangkan realisasi investasi bersifat volatil—sangat tinggi pada 2021–2022 (1.118,50 dan 1.002,32 miliar Rp), turun tajam pada 2023, dan pulih moderat pada 2024 serta Triwulan III 2025 (491,82 miliar Rp).

Dari capai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode 2021-2025, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Tujuan :

- Terwujudnya Pelayanan Perizinan Berkualitas dan meningkatnya investasi daerah

Sasaran :

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- Meningkatkan Investasi Daerah
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025, target pertumbuhan ekonomi pada akhir periode 2030 sebesar 8%. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut pemerintah membutuhkan realisasi investasi sebesar Rp. 13.032,32 Triliun. Dalam hal mendukung program nasional, Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat merumuskan pertumbuhan realisasi investasi untuk periode 2025 – 2030 sebesar 13,4%. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TANJUNG JABUNG BARAT											
Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Terwujudnya Pelayanan Perizinan Berkualitas dan meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	91,21	91,50	91,75	92,00	92,25	92,50	92,75	
		Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	370	440	448	457	467	478	490	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	80,21	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00	82,25	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Misi 2: Berkah dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Pelayanan Perizinan Berkualitas dan meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Digitalisasi dan Sistem Perizinan Online	Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem perizinan online untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan izin
		One-Stop Service (Mal Pelayanan Publik)	Mendirikan pusat layanan terpadu yang menyediakan berbagai jenis perizinan di satu tempat untuk mempermudah akses dan mengurangi birokrasi (Mal Pelayanan Publik)
			Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan bagi pemohon izin di pusat layanan terpadu dan di kecamatan melalui pelayanan keliling
		Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Aparatur	Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur yang terlibat dalam pelayanan perizinan

Transparansi dan Akuntabilitas Proses Perizinan	Menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik yang jelas dan terukur
	Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap proses perizinan untuk memastikan kualitas pelayanan
	Menyediakan Saluran Pengaduan yang aman dan mudah diakses oleh masyarakat

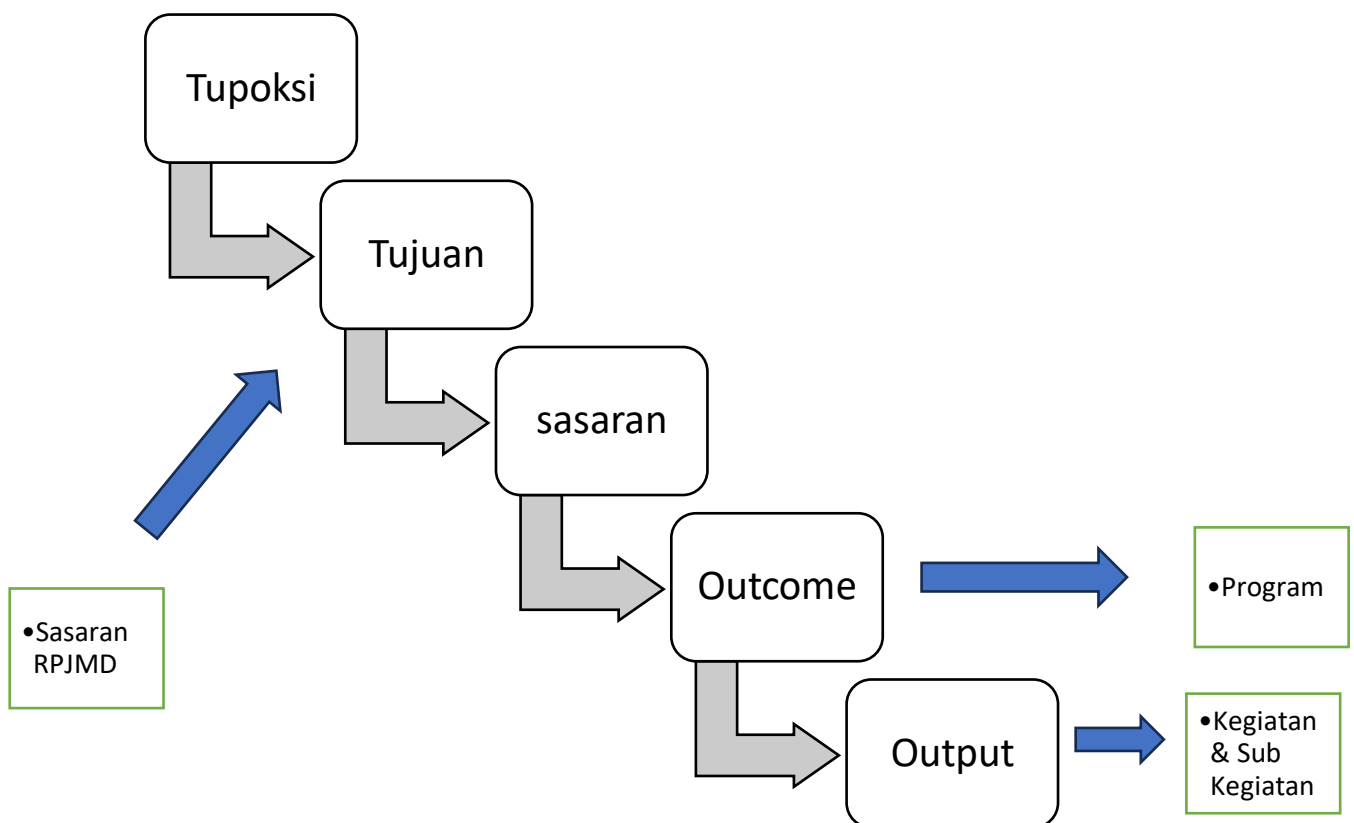
Misi 3:	Berkah dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Pemerataan Pembangunan dari Desa ke Kota yang berkelanjutan			
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Terwujudnya Pelayanan Perizinan Berkualitas dan meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	Promosi dan Sosialisasi Peluang Investasi	Mengadakan promosi dan sosialisasi secara aktif mengenai peluang investasi di daerah kepada calon investor, baik domestik maupun asing
			Mendorong Investasi Sektor Unggulan Daerah	Mengidentifikasi dan mempromosikan sektor-sektor unggulan daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui penanaman modal
			Penyediaan Insentif Investasi	Memberikan insentif dan kemudahan bagi investor yang memenuhi kriteria tertentu, seperti pembebasan pajak atau kemudahan akses lahan
			Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Regulasi	Memastikan bahwa seluruh kegiatan investasi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pengawasan dan pengendalian penanaman modal
				Mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan data serta informasi yang akurat mengenai pelaksanaan investasi untuk mendukung pengambilan keputusan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi dengan rincian per sasaran yang searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, program- program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:



Grafik 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan/ Renstra PD

Tabel 4.2. Rumusan Program / Kegiatan / Subkegiatan / Renstra DPMPTSP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TANJUNG JABUNG BARAT							
- Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Terwujudnya Pelayanan Perizinan Berkualitas dan meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)		
					Persentase usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (%)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Jumlah izin yang diterbitkan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Jumlah izin yang diterbitkan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
				Jumlah izin yang diterbitkan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
				Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
				Jumlah izin yang diterbitkan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman Modal (%)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Tersedianya data dan informasi penanaman modal	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		Meningkatnya Investasi Daerah			Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)		
					Rasio Realisasi total terhadap target (%)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Jumlah Kebijakan Daerah mengenai Penanaman Modal	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase peningkatan investor yang berinvestasi (%)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Jumlah permintaan informasi investasi dari calon investor	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah permintaan informasi investasi dari calon investor		2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah permintaan informasi investasi dari calon investor	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		Nilai Realisasi investasi (Milyar Rupiah)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Nilai Realisasi Investasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
					Nilai AKIP OPD (*)		
					Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terselenggaranya Administrasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Kepegawaian Dengan Baik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhi Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Untuk jumlah target dan pagu indikatif Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun pada table 4.3.

Tabel 4.3
Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				14.020.000.000,0 0		18.578.000.000,0 0		21.995.600.000,0 0		26.466.600.000,0 0		33.096.583.000,0 0		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.715.000.000,0 0		16.494.000.000,0 0		19.639.900.000,0 0		24.718.990.000,0 0		31.263.290.000,0 0		
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	100	100	12.715.000.000,0 0	100	16.494.000.000,0 0	100	19.639.900.000,0 0	100	24.718.990.000,0 0	100	31.263.290.000,0 0	2.18.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	91,207	91,75		92		92,25		92,50		92,75			
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				65.000.000,00		84.500.000,00		109.850.000,00		142.805.000,00		185.647.000,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	65.000.000,00	10	84.500.000,00	10	109.850.000,00	10	142.805.000,00	10	185.647.000,00		
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				65.000.000,00		84.500.000,00		109.850.000,00		142.805.000,00		185.647.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	65.000.000,00	10	84.500.000,00	10	109.850.000,00	10	142.805.000,00	10	185.647.000,00		
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.630.000.000,00		8.619.000.000,00		11.204.700.000,0 0		14.566.110.000,0 0		18.935.943.000,0 0		
Terlaksananya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	6.630.000.000,00	12	8.619.000.000,00	12	11.204.700.000,0 0	12	14.566.110.000,0 0	12	18.935.943.000,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
			(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)			(11)
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37	12			12		12		12		12			
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.370.000.000,00		8.281.000.000,00		10.765.300.000,00		13.994.890.000,00		18.193.357.000,00			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37	12	6.370.000.000,00	12	8.281.000.000,00	12	10.765.300.000,00	12	13.994.890.000,00	12	18.193.357.000,00			
2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				260.000.000,00		338.000.000,00		439.400.000,00		571.220.000,00		742.586.000,00			
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	260.000.000,00	12	338.000.000,00	12	439.400.000,00	12	571.220.000,00	12	742.586.000,00			
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00			
Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Dengan Baik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	64	150	150.000.000,00	150	150.000.000,00	150	150.000.000,00	150	150.000.000,00	150	150.000.000,00			
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00			
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	64	150	150.000.000,00	150	150.000.000,00	150	150.000.000,00	150	150.000.000,00	150	150.000.000,00			
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.495.000.000,00		1.943.500.000,00		2.526.550.000,00		3.284.515.000,00		4.269.870.000,00			
Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	1.495.000.000,00	12	1.943.500.000,00	12	2.526.550.000,00	12	3.284.515.000,00	12	4.269.870.000,00			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				52.000.000,00		67.600.000,00		87.880.000,00		114.244.000,00		148.517.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	52.000.000,00	12	67.600.000,00	12	87.880.000,00	12	114.244.000,00	12	148.517.000,00		
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				104.000.000,00		135.200.000,00		175.760.000,00		228.488.000,00		297.034.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	104.000.000,00	12	135.200.000,00	12	175.760.000,00	12	228.488.000,00	12	297.034.000,00		
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				117.000.000,00		152.100.000,00		197.730.000,00		257.049.000,00		334.164.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	117.000.000,00	12	152.100.000,00	12	197.730.000,00	12	257.049.000,00	12	334.164.000,00		
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				117.000.000,00		152.100.000,00		197.730.000,00		257.049.000,00		334.164.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	117.000.000,00	12	152.100.000,00	12	197.730.000,00	12	257.049.000,00	12	334.164.000,00		
2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				65.000.000,00		84.500.000,00		109.850.000,00		142.805.000,00		185.647.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	65.000.000,00	12	84.500.000,00	12	109.850.000,00	12	142.805.000,00	12	185.647.000,00		
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.040.000.000,00		1.352.000.000,00		1.757.600.000,00		2.284.880.000,00		2.970.344.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	1.040.000.000,00	12	1.352.000.000,00	12	1.757.600.000,00	12	2.284.880.000,00	12	2.970.344.000,00		
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.200.000.000,00		1.910.000.000,00		1.110.000.000,00		1.110.000.000,00		1.110.000.000,00		
Terpenuhi Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	1.200.000.000,00	5	1.910.000.000,00	5	1.110.000.000,00	5	1.110.000.000,00	5	1.110.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	16	1		6		3		3		3			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00		
2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000,00		950.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	16	1	200.000.000,00	6	950.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00		
2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5	50.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.065.000.000,00		1.164.000.000,00		1.272.900.000,00		1.392.690.000,00		1.524.459.000,00		
Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.065.000.000,00	12	1.164.000.000,00	12	1.272.900.000,00	12	1.392.690.000,00	12	1.524.459.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12				12				12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12				12				12			
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00		
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				990.000.000,00		1.089.000.000,00		1.197.900.000,00		1.317.690.000,00		1.449.459.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	990.000.000,00	12	1.089.000.000,00	12	1.197.900.000,00	12	1.317.690.000,00	12	1.449.459.000,00		
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.110.000.000,00		2.623.000.000,00		3.265.900.000,00		4.072.870.000,00		5.087.371.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	2.110.000.000,00	1	2.623.000.000,00	1	3.265.900.000,00	1	4.072.870.000,00	1	5.087.371.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16		16		16		16					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40		40		40		40					
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				600.000.000,00		720.000.000,00		864.000.000,00		1.036.800.000,00		1.244.160.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	600.000.000,00	1	720.000.000,00	1	864.000.000,00	1	1.036.800.000,00	1	1.244.160.000,00		
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				600.000.000,00		720.000.000,00		864.000.000,00		1.036.800.000,00		1.244.160.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16	600.000.000,00	16	720.000.000,00	16	864.000.000,00	16	1.036.800.000,00	16	1.244.160.000,00		
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				650.000.000,00		845.000.000,00		1.098.500.000,00		1.428.050.000,00		1.856.465.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40	650.000.000,00	40	845.000.000,00	40	1.098.500.000,00	40	1.428.050.000,00	40	1.856.465.000,00		
2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				260.000.000,00		338.000.000,00		439.400.000,00		571.220.000,00		742.586.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	260.000.000,00	2	338.000.000,00	2	439.400.000,00	2	571.220.000,00	2	742.586.000,00		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				480.000.000,00		1.124.000.000,00		1.429.700.000,00		680.610.000,00		766.293.000,00		
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Rasio Realisasi total terhadap target (%)	100	100	480.000.000,00	100	1.124.000.000,00	100	1.429.700.000,00	100	680.610.000,00	100	766.293.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				130.000.000,00		135.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Jumlah Kebijakan Daerah mengenai Penanaman Modal	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	0	1	130.000.000,00	1	135.000.000,00	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00		
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1		1		0		0		0			
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				50.000.000,00		50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh				80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	0	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00		
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				350.000.000,00		989.000.000,00		1.339.700.000,00		585.610.000,00		671.293.000,00		
Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	350.000.000,00	1	989.000.000,00	1	1.339.700.000,00	1	585.610.000,00	1	671.293.000,00		
	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1				1		0		0			
	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	0	1				1		1		1			
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)				130.000.000,00		169.000.000,00		219.700.000,00		285.610.000,00		371.293.000,00		
Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	0	1	130.000.000,00	1	169.000.000,00	1	219.700.000,00	1	285.610.000,00	1	371.293.000,00		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				100.000.000,00		700.000.000,00		1.000.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
			(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	700.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				400.000.000,00		475.000.000,00		400.000.000,00		490.000.000,00		490.000.000,00		
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi (%)	6,8	2,08	400.000.000,00	2,04	475.000.000,00	2,00	400.000.000,00	1,96	490.000.000,00	1,92	490.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				400.000.000,00		475.000.000,00		400.000.000,00		490.000.000,00		490.000.000,00		
Jumlah permintaan informasi investasi dari calon investor				0		0		0		0		0		
	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	0	0		1		0		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	8	2		2		2		2		2			
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	8	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		75.000.000,00		0,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	1	75.000.000,00	0	0,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				330.000.000,00		390.000.000,00		410.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (%)	100	100	330.000.000,00	100	390.000.000,00	100	410.000.000,00	100	460.000.000,00	100	460.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				330.000.000,00		390.000.000,00		410.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		
Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	3	270.000.000,00	3	330.000.000,00	3	350.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	4	6		6		6		6		6			
Jumlah izin yang diterbitkan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	14.038	1.500	60.000.000,00	1.500	60.000.000,00	1.500	60.000.000,00	1.500	60.000.000,00	1.500	60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	5.634	500		500		500		500		500			
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				150.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	3	150.000.000,00	3	180.000.000,00	3	200.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00		
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	14.038	1.500	30.000.000,00	1.500	30.000.000,00	1.500	30.000.000,00	1.500	30.000.000,00	1.500	30.000.000,00		
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				120.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	4	6	120.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	5.634	500	30.000.000,00	500	30.000.000,00	500	30.000.000,00	500	30.000.000,00	500	30.000.000,00		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				75.000.000,00		75.000.000,00		91.000.000,00		92.000.000,00		92.000.000,00		
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Nilai Realisasi investasi (Milyar Rupiah)	370	445	75.000.000,00	454	75.000.000,00	466	91.000.000,00	481	92.000.000,00	499	92.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000,00		75.000.000,00		91.000.000,00		92.000.000,00		92.000.000,00		
Jumlah Nilai Realisasi Investasi	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	10	6	75.000.000,00	6	75.000.000,00	6	91.000.000,00	6	92.000.000,00	6	92.000.000,00		
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan	35	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)													
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	260	60		90		90		90					
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				6.500.000,00		6.500.000,00		7.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	10	6	6.500.000,00	6	6.500.000,00	6	7.500.000,00	6	8.500.000,00	6	8.500.000,00		
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				60.000.000,00		60.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	260	60	60.000.000,00	90	60.000.000,00	90	75.000.000,00	90	75.000.000,00	90	75.000.000,00		
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan	35	12	8.500.000,00	12	8.500.000,00	12	8.500.000,00	12	8.500.000,00	12	8.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Berusaha (Kegiatan Usaha)													
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman Modal (%)	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya data dan informasi penanaman modal	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00		
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00		

Tabel 4.4
Daftar Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TANJUNG JABUNG BARAT				
1,	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
			2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2,	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
			2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
3,	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TANJUNG JABUNG BARAT										
1	Nilai Realisasi Investasi	Milyar Rupiah	370	440	448	457	467	478	490	
2	Nilai AKIP OPD	Indeks	80,207	81	81,25	81,50	81,75	82	82,25	
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indeks	91,207	91,50	91,75	92	92,25	92,50	92,75	

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
1	Dokumen Promosi Investasi (IPRO)	komulatif	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	positif	Pelaku Usaha	47	48	49	50	51	52	53	
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	positif	Milyar Rupiah	370	440	445	454	466	481	499	
4	Persentase peningkatan realisasi (PMDN/PMA)	positif	%	19,3	18,92	1,14	2,02	2,64	3,22	3,74	
5	Rasio daya serap tenaga kerja	positif	Orang	280	350	450	470	500	510	510	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 telah disusun berdasarkan analisis mendalam terhadap tantangan dan peluang yang ada. Dokumen ini menjadi panduan utama bagi perangkat daerah dalam menjalankan peran strategisnya guna meningkatkan investasi dan pelayanan publik secara efektif.

Kami berharap bahwa seluruh program dan kebijakan yang telah dirumuskan dalam dokumen ini dapat diimplementasikan dengan optimal serta mendukung pencapaian visi daerah. Kesuksesan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin berkembang menjadi wilayah yang berdaya saing, ramah investasi, dan memberikan pelayanan publik yang prima.